



PARLEMENTARIA

Mesti Awal Tahun

PEMBAHASAN RAPBD 2023 harus sinkron dengan waktu penetapan terakhir, yakni 30 November 2022. Jangan ada lagi keterlambatan, walaupun masih alot dikupas antara tim Banggar DPRD dan TAPD Pemprov Kalbar. Sebab bagaimanapun APBD 2023 menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Irsan, anggota DPRD Kalimantan Barat mengatakan hal tersebut kepada wartawan disela-sela pembahasan RAPBD 2023. "Kami berharap agar proses perencanaan APBD 2023 dilakukan di awal tahun, agar tidak terjadi lagi keterlambatan proses lelang pada akhir tahun. Dampaknya pernah prososes pencairan tidak semuanya menyentuh angka 100 persen. Bahkan sempat terhutang kepada pelaksana jasa kontruksi segala," katanya.



Mesti Awal Tahun

Sambungan dari halaman 9

Menurut dia, pada musim akhir tahun, Kalbar rentan dengan musim penghujan dengan air pasang. Jelas saja ini bakal berakibat pada mutu pekerjaan yang ada.

Pelaksana proyek juga merasa kewalahan ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan. "Dapat berakibat pada mutu atau kualitas pekerjaan. Kami berharap pada APBD 2023 terakhir pemerintahan Midji-Norsan, bakal berubah metode pelaksanaan tersebut," ujarnya.

Politisi PKB Kalbar ini meminta pola pelaksanaannya harus diubah sesuai mekanisme berlaku. Dengan begitu proses pelaksanaan pelelangan

dapat dipercepat. Demikian juga menyangkut pekerjaan APBD murni di akhir tahun atau semester, ada baiknya ditinjau ulang. "Semester 2 dan 3 adalah pekerjaan fisik paling memungkinkan jika ingin ditertibkan oleh dinas," ucapnya.

Masalah infrastruktur, anggota DPRD Kalbar asal dapil Kubu Raya-Mempawah ini, mengusulkan adanya peningkatan infrastruktur. Namun dia berharap ada status jalan yakni kabupaten menjadi jalan provinsi. Beberapa ruas jalan tersebut cukup banyak pada beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. "Ada satu dan dua jalan. Untuk dianggarkan dari APBD kabupaten atau dana desa

rasanya tidak mungkin," kata dia.

Ruas-ruas jalan tersebut selain panjang juga masuk kategori rusak cukup parah. Kalau dipaksakan anggarannya datang dari APBD kabupaten, dampaknya akan menguras dana publik tidak kecil. Daerah sendiri seakan angkat tangan untuk menanganin karena keterbatasan APBD juga.

Untuk itulah, sambungnya, sewajarnya Gubernur Kalbar saat ada usulan dari kabupaten/kota agar dapat diterima status peningkatan jalannya menjadi ruas jalan provinsi. "Agar ada partisipasi pemerintah provinsi menyelesaikan usulan tersebut yang jadi hambatan di kabupaten," pungkasnya. **(den)**